

Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Pada Provinsi Banten

¹Dyah Ayu Dwi Pitaloka, ²Kharisma Zahro Awalluna, ³Deris Desmawan

¹Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 5553210050@untirta.ac.id

²Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 5553210096@untirta.ac.id

³Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, derisdesmawan@untirta.ac.id

Abstract

This study is an analysis of data from BPS Banten sources and aims to identify the impact of the Human Development Index on the poverty headcount in Banten over the period 2012-2021. Determined by applying a simple linear regression method using the variables. A supporting application, by SPSS or Statistical Product and Service Solutions.

Keywords: Influence Analysis, Human Development Index, Total Population.

Pendahuluan

Salah satu bidang dalam pembangunan nasional suatu negara dengan tujuan mensejahterakan masyarakatnya adalah dengan pembangunan ekonomi. Adapun, tingkat kesejahteraan masyarakat sendiri dapat dilihat berdasarkan aspek ekonominya yang diukur dengan pendapatan nasional perkapita atau perorangan. Terjadinya pertumbuhan ekonomi positif, yaitu arah pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat terus menerus dari tahun ketahunnya dapat diukur dengan naiknya PDB (produk domestik bruto) yang akan menimbulkan peningkatan pendapatan nasional. Meningkatnya PDB adalah satu hal yang sangat penting untuk dicapai dalam pembangunan ekonomi suatu negara, terlebih lagi pada negara yang baru berkembang. Oleh karenanya, banyak negara yang pada awalnya terbentuk akan lebih memerhatikan pembangunan ekonomi terlebih dahulu. Menurut Hidayat pada tahun 2013, pembangunan ekonomi suatu negara tidak akan pernah bisa lepas dari pertumbuhan ekonomi, karena seiring adanya pembangunan ekonomi, maka akan semakin mendorong pula terjadinya pertumbuhan ekonomi, maka dengan itu, dengan adanya pertumbuhan ekonomi akan dapat memperlancar pembangunan ekonomi.

Terdapat tiga indikator pokok dalam pembangunan ekonomi, yaitu : (1) Indikator moneter, yaitu indikator yang terkait halnya dengan uang yang diterima masyarakat atau lebih tepatnya adalah pendapatan atau income. Variabel yang digunakan pada indikator moneter ini adalah pendapatan per kapita. Alasannya adalah karena pendapatan per kapita dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam indikator pembangunan suatu negara dengan tujuan membedakan antar negara yang maju dan negara sedang berkembang (NSB). Pendapatan per kapita memang bisa menggambarkan tentang jalannya laju pertumbuhan atau tingkat kesejahteraan masyarakatnya, namun selain itu, dapat juga menggambarkan tentang perubahan corak atau struktur dari tingkat kesejahteraan masyarakat yang telah berlangsung di berbagai negara. (2) Indikator non-moneter, indikator ini diambil berdasarkan sejumlah hal wajib atau pokok diambil dari masyarakat. Indikator ini memiliki beberapa macam sub

indikator yaitu, (a) indikator sosial, sebagai ukuran dalam membandingkan tingkat kesejahteraan antar masyarakat, (b) indeks kualitas hidup dan indeks pembangunan manusia, tolak ukur kesejahteraan masyarakatnya, (3) Indikator campuran, artinya indikator ini adalah campuran antara indikator moneter dan non-moneter contohnya seperti, akses kesehatan, sekolah/pendidikan, perumahan warga, angkatan kerja, perekonomian masyarakat, kejahatan dan kriminalitas, perjalanan wisata dan adanya akses media massa. Tiga indikator tersebut, memiliki satu permasalahan yang sama, yaitu indeks pembangunan manusia (IPM), angkatan kerja yang semakin meningkat dan tingkat kemiskinan yang semakin tinggi, semua permasalahan tersebut sebetulnya bisa terselesaikan jika pembangunan di negara tersebut baik (Lincoln Arsyad, 2004:25). Indeks Pembangunan Manusia atau IPM dijadikan sebagai satu hal yang mendasar dalam pembangunan ekonomi di suatu daerah. Dengan adanya pernyataan tersebut, dapat dipastikan bahwa IPM menjadi aspek terpenting dalam pembangunan ekonomi suatu daerah. Tentunya, aspek IPM serta indikator pembangunan yang lainnya jika dilaksanakan dengan baik maka akan berpengaruh pada semakin baiknya pula terlaksananya pembangunan daerah. IPM sebagai tolak ukur tingkat pembangunan suatu daerah seharusnya bisa berhubungan positif terhadap tingkat kemiskinan di daerah tersebut agar diharapkan, jika daerah yang memiliki tingkat IPM tinggi, maka kualitas hidup masyarakatnya juga akan tinggi ataupun sebaliknya (Kurnia Lismawati, 2007).

Landasan Teori

Teori Lingkaran Kemiskinan Permintaan (Demand)

Pada negara yang bisa disebutkan dalam kategori miskin, pendapatan masyarakatnya sangat rendah dan oleh karena itu insentif untuk berinvestasi pun rendah, maka area pasar yang digunakan sebagai media barang yang lengkap pun terbatas. Income yang ada pada masyarakat menjadi sangat rendah dan hal itu diakibatkan karena rendahnya tingkat produktivitas yang terdapat pada masyarakat tersebut, hal ini mencerminkan adanya pembentukan modal yang terbatas di masa lampau atau pada masa awal pembangunan ekonomi di daerah tersebut. Adapun akumulasi modal yang terkumpul tentunya akan terbatas pula yang diakibatkan karena satu dan lain hal, contohnya seperti kurangnya insentif investasi dan yang lainnya adalah karena terdapatnya teori lingkaran setan kemiskinan. Lingkaran kemiskinan merupakan rangkaian beberapa hal yang terjadi di masyarakat yang saling berhubungan antar satu dan lainnya lalu mengakibatkan miskinnya suatu negara serta banyaknya masalah yang timbul dan masih banyak lagi kesulitan-kesulitan yang terdapat dalam lingkaran kemiskinan itu, sehingga untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih baik adalah hal yang sangat sulit untuk dicapai. Produktivitas yang semakin rendah tentunya disebabkan karena banyaknya keterpurukan dan keterbelakangan ataupun ketidaksempurnaan dari pasar yang terdapat dalam suatu wilayah itu sendiri. Produktivitas yang semakin rendah akan menyebabkan income atau uang yang diterima masyarakat yang semakin rendah pula. Income atau pendapatan yang semakin rendah ini akan dikaitkan atau dihubungkan dengan dua hal yang dianggap penting dalam pendapatan, yaitu tabungan serta investasi. Karena tabungan dan investasi yang rendah, entah itu investasi sumber daya manusianya atau modalnya, hal tersebut akan mengakibatkan pembangunan ekonomi yang semakin terpuruk dan rendah. Pendapat ini dikeluarkan oleh Ragnar Nurkse pada tahun 1953, ia berargumen bahwa menurutnya perangkap kemiskinan dalam suatu negara atau suatu wilayah

memiliki dua poin, salah satunya yaitu dengan berproduktivitas yang rendah, maka akan rendah pula income masyarakat dan rendahnya kemampuan masyarakat untuk berinvestasi atau menabung. Dengan rendahnya kemampuan masyarakat untuk menabung tentunya akan mengakibatkan penurunan akumulasi modal dan penurunan akumulasi modal ini akan menyebabkan adanya kekurangan modal serta turunya produktivitas pada masyarakat itu sendiri. Selain itu, jika dilihat berdasarkan sisi permintaannya, insentif akan masyarakat untuk berinvestasi di negara yang kurang berkembang sangatlah rendah. Hal tersebut diakibatkan karena masyarakatnya yang memiliki pendapatan rendah, sehingga masyarakat akan membatasi perluasan masyarakat untuk menjual berbagai macam barang. Income masyarakat yang kurang karena produktivitas yang kurang juga akan membentuk akumulasi modal yang terbatas. Oleh karena itu, akumulasi modal yang diakibatkan karena tidak adanya rangsangan untuk para anggotanya menginvestasikan tambahan modal. Adam Smith (1729-1790) akan berperan sebagai pemain utama dengan apa yang ia kemukakan sebagai sekolah ekonomi klasik, dengan ini ia menyebutkan bahwa dalam kemakmuran bangsa dan negara, orang adalah faktor penentu utama, karena pada faktor lainnya seperti alam dan tanah tidak akan ada sumber daya yang cerdas yang akan digunakan manusia dalam kehidupannya tersebut.

Teori Jumlah Penduduk

Menurut orang dahulu, populasi umumnya dianggap sebagai kendala pembangunan, terutama populasi tinggi dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi pula. Oleh karena itu, bisa dikatakan pada saat itu penduduk merupakan beban bagi pembangunan suatu negara. Menurut supra pada tahun 2001 ialah akumulasi atau total jumlah orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah dengan waktu yang terbatas dan mereka adalah hasil dari proses demografi, seperti angka kelahiran, kematian serta migrasi.

Teori kemiskinan

Proses kerugian atau kemelaratan yang terdapat pada masyarakat dapat diawali dan dapat pula diakhir, dengan satu hal yang disebut kemiskinan. Dengan sekaligus banyaknya faktor yang secara bersamaan terjadi di suatu wilayah, seperti faktor dalam kelemahan jasmani, rawan serta ketidakberdayaan daripada kemampuan masyarakat itu sendiri serta pengisolasi akan membuat masyarakat terjebak di wilayahnya sehingga sulit keluar dari yang disebut sindrom kemiskinan. Kemiskinan adalah kata yang sudah sering didengar oleh banyak orang diluar sana, namun mereka tidak mau menyadari lebih lanjut atau menelaah lebih lanjut serta mempelajari lebih lanjut tentang apa arti kemiskinan sesungguhnya dan mengapa seseorang dapat dikatakan sebagai orang miskin. Sesungguhnya kemiskinan dapat dijelaskan sebagai suatu batas atau standar dalam kehidupan yang berada di titik terendah yang ditandai dengan adanya kekurangan material yang lebih rendah tingkatnya dibandingkan dengan standar atau batas yang umum berlaku pada masyarakat di daerah yang bersangkutan. Dalam ilmu ekonomi dapat pula diartikan, kemiskinan sebagai kurangnya sumber daya di suatu wilayah yang digunakan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya di wilayah tersebut. Adapun, kemiskinan berarti suatu gambaran, kondisi serta situasi, seperti banyaknya kekurangan dan terbatasnya berbagai sumber daya serta modal yang dimiliki serta rendahnya pula investasi pada manusianya, seperti rendahnya pendidikan, maka keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki pun akan rendah, lalu

rendahnya produktivitas, pendapatan, lemahnya nilai tukar baik itu uang ataupun hasil produksi masyarakat kurang berkembang tersebut serta terbatasnya berbagai kesempatan untuk berperan dalam pembangunan di suatu negara. Menurut Bappenas pada tahun 2004, menjelaskan kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang atau suatu kelompok orang, baik itu laki-laki maupun perempuan yang tidak dapat memenuhi hak-hak kebutuhan dasarnya untuk lebih mengembangkan hidupnya yang lebih bermartabat. Adapun hal-hal dasar tersebut yang dimaksud, seperti terpenuhinya kebutuhan dasar yang menjadi pokok untuk kebutuhan sehari-hari seperti pangan, pendidikan, kesehatan, mendapatkan pekerjaan yang layak, perumahan yang layak, air yang bersih, kemampuan pertahanan, sumber daya alam yang baik, serta lingkungan hidup yang baik pula dan tentunya memiliki rasa aman dan nyaman dari segala perlakuan yang didapati serta tidak adanya kekerasan dan terjaminnya hak untuk berpartisipasi pada lingkungan sosialnya.

Hipotesis

Hipotesis Penelitian

- 1.H0 : Tidak terdapat pengaruh antara Indeks Pembangunan Manusia terhadap Jumlah Penduduk Miskin
- 2.H1 : Terdapat pengaruh antara Indeks Pembangunan Manusia terhadap Jumlah Penduduk Miskin

Hipotesis Statistik

- 1.H0 : $\beta_1 = 0$. Tidak terdapat pengaruh
- 2.H1 : $\beta_1 \neq 0$. Terdapat pengaruh

Analisis

Identifikasi Variabel:

- 1.Variabel Dependent: Jumlah Penduduk Miskin
2. Variabel Independent: Indeks Pembangunan Manusia

Metodologi Penelitian

Jenis dan Sumber Data

Kuantitatif adalah jenis data yang digunakan pada penelitian kali ini. Adapun data yang digunakan merupakan data sekunder yang berasal dari Badan Pusat Statistik wilayah Provinsi Banten dengan Data Time Series berjangka 10 Tahun di kurun waktu Tahun 2012-2021.

Metode Pengumpulan Data

Penelitian yang dilakukan ini menggunakan Teknik metode analisis regresi sederhana satu variabel.

Teknik Analisis Data

Dengan menggunakan aplikasi pengolah penunjang, yaitu SPSS.

Hasil Dan Pembahasan

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.	95,0% Confidence Interval for B

		B	Std. Error	Beta			Lower Bound	Upper Bound
1	(Constant)	1424.899	1086.553		-1.311	.226	-3930.494	1080.696
	IPM	29.857	15.290	.568	1.953	.087	-5.403	65.117

a. Dependent Variable: Jumlah Penduduk Miskin

Fungsi

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X + e$$

$$JPM = \beta_0 + \beta_1 IPM + e$$

Persamaan Regresi

$$JPM = -1424.899 + 29.857IPM + e$$

Interpretasi

$\beta_0 = -1424.899$: Ketika variabel independen sama dengan nol maka nilai variable Jumlah Penduduk Miskin sebesar -1424.899%.

$\beta_1 = IPM = 29.857$: Ketika IPM naik 1 Rupiah maka Jumlah Penduduk Miskin naik sejumlah 29.857%.

Uji T

Berdasarkan output yang telah diketahui tersebut, didapati bahwa T hitung 1.953 < t tabel 2.3060 : H₁ ditolak dan sig 0,087 < 0,05 : signifikan, artinya TIDAK ada pengaruh signifikan antara Indeks Pembangunan Manusia dan Jumlah Penduduk Miskin.

Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

Setelah meneliti tentang pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Jumlah Penduduk Miskin di provinsi Banten, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu indikator atau variable yang memengaruhi Jumlah Penduduk Miskin yang ada di provinsi Banten, namun tidak terlalu signifikan. Hal ini disebabkan masih banyaknya variable-variable yang dapat memengaruhi besarnya Jumlah Penduduk Miskin di provinsi Banten sehingga satu variable tidak terlalu berpengaruh pada satu variable dependen yaitu Jumlah Penduduk Miskin karena variable dependen ini memerlukan banyak variable yang berkontribusi secara bersamaan untuk dapat memengaruhi besaran Jumlah Penduduk Miskin tersebut.

Saran

Saran yang dapat kami sebagai peneliti rekomendasikan berdasar pada hasil dan pembahasan yang telah diperoleh adalah dengan tetap memerhatikan variable Indeks Pembangunan Manusia karena tetap berpengaruh meskipun sedikit, Adapun hal yang bisa dilakukan, yaitu:

1. Mengutamakan pembangunan daerah yang relatif tertinggal, namun jangan menyerah pada pengembangan daerah yang lebih maju.
2. Kami akan membangun basis pertumbuhan baru berdasarkan potensi utama daerah yang diharapkan menjadi basis pertumbuhan baru.
3. Pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan diharapkan dapat dikembangkan secara merata di daerah-daerah yang relatif tertinggal, terutama di perdesaan, dan peningkatan kualitas penduduk.

Daftar Pustaka

- (Badan Pusat Statistik, n.d.-a; Badan Pusat Statistik, n.d.-b; BPS Provinsi Banten, n.d.; Didu & Fauzi, 2016; Rah Adi Fahmi et al., 2018; Sayifullah & Gandasari, 2016; Widiastuti, 2022)
- Badan Pusat Statistik. (n.d.-a). Retrieved October 3, 2022, from <https://www.bps.go.id/statictable/2014/01/30/1494/jumlah-penduduk-miskin-persentase-penduduk-miskin-dan-garis-kemiskinan-1970-2017.html>
- Badan Pusat Statistik. (n.d.-b). Retrieved October 3, 2022, from <https://www.bps.go.id/indicator/6/543/4/tingkat-pengangguran-terbuka-menurut-provinsi.html>
- BPS Provinsi Banten. (n.d.). Retrieved October 3, 2022, from <https://banten.bps.go.id/indicator/26/73/1/indeks-pembangunan-manusia-ipm-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-banten.html>
- Didu, S., & Fauzi, F. (2016). Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Lebak. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 6(1), 102–117. <https://doi.org/10.35448/jequ.v6i1.4199>
- Rah Adi Fahmi, G., Setyadi, S., & Suiro, U. (2018). Analisis Strategi Penanggulangan Kemiskinan Di Provinsi Banten. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 8(2), 227–248. <https://doi.org/10.35448/jequ.v8i2.4450>
- Sayifullah, S., & Gandasari, T. R. (2016). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Banten. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 6(2), 236–255. <https://doi.org/10.35448/jequ.v6i2.4345>
- Widiastuti, A. (2022). *Jurnal Ekonomi-Qu Analisis Sektor Ekonomi Unggulan di Kabupaten Lebak Periode Tahun 2016-2020*. 6(2021).